

INDUSTRI PERBANKAN ASEAN : SEBUAH TINJAUAN KUALITATIF

J. PANGLAYKIM

PENDAHULUAN

Para pengusaha bank dari negara-negara ASEAN berkumpul di Bali bulan Januari 1979 atas prakarsa ASEAN Banking Council (Dewan Perbankan ASEAN). Karena yang ditunjuk menjadi tuan rumah kali ini adalah Indonesia maka para anggota Dewan dan pengusaha-pengusaha bank peserta telah menjatuhkan pilihannya atas Bali sebagai tempat pertemuan.

Dewan Perbankan ASEAN kini telah berusia tiga tahun. Para pengusaha bank ASEAN ingin mengetahui apa saja yang kiranya dapat dicatat sebagai prestasi badan tersebut selama ini. Sejak semula ada kelompok-kelompok pengusaha bank tertentu yang telah menyatakan kurangpercayaannya atas kegunaan atau manfaat hasil-hasil pertemuan semacam yang diadakan di Bali.

Satu kelompok mengetengahkan, karena pada akhirnya yang akan membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan dan menentukan arah pengembangan perbankan adalah pemerintah beserta aparatur birokasinya, maka sebaiknya soal-soal ini diserahkan saja kepada pemerintah masing-masing negara ASEAN. Kelompok lainnya berpendapat, bahwa mereka mungkin dapat memberikan penerangan-penerangan kepada pemerintah mereka masing-masing tentang perkembangan-perkembangan di dalam

ANALISA

industri perbankan regional. Mungkin mereka akan mengajukan beberapa masalah kepada pemerintah mereka masing-masing untuk memperoleh pembimbingan dan dengan demikian mereka akan lebih banyak menempuh suatu garis "mencari titik-titik pertemuan" daripada "mempermasalahkan perbedaan-perbedaan".

Kelompok yang lain lagi yang terdiri dari para bankir yang "mengikuti arus" saja menghadiri pertemuan tersebut tetapi dalam pada itu mereka sekedar bersikap "tunggu dan lihat". Mereka mengikuti pertemuan dan tetap bungkem tetapi memasang mata dan telinga lebar-lebar.

Maksud karangan yang singkat ini bukanlah membahas industri perbankan ASEAN secara mendalam dan terperinci tetapi mengajukan beberapa bahan pemikiran yakni bahan pemikiran mengenai beberapa masalah yang menurut hemat penulis perlu mendapat perhatian yang lebih besar.

DENOMINATOR BERSAMA

Pada pertemuan-pertemuan antara kelompok-kelompok yang majemuk biasanya akan ada hal-hal yang mungkin dijadikan suatu denominator bersama kelompok-kelompok tersebut. Biasanya akan ada hal-hal di mana mereka memperlihatkan kecenderungan mencapai kesepakatan dan hal-hal di mana pandangan-pandangan mereka justru tidak dapat dipertemukan. Dengan demikian maka seandainya yang hendak dicapai adalah peningkatan kualitatif dan bukan kuantitatif maka dapatlah diperkirakan bahwa di kalangan Dewan Perbankan ASEAN akan ada kelompok-kelompok yang akan mencari denominator bersama itu.

KEPERCAYAAN

Hal yang membawa pertumbuhan dan pengembangan bagi setiap bank dan industri perbankan adalah kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Dengan demikian maka "barang" terpenting yang dijual bank baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar adalah kepercayaan. Para nasabah bank harus mempunyai kepercayaan mereka akan dapat menerima kembali uang yang didepositokan mereka. Di lain pihak bank yang meminjamkan uang kepada nasabah pun harus mempunyai kepercayaan ia akan mendapat kembali uang yang dipinjamkannya itu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Uang yang dipinjamkan kepada nasabah bukanlah milik bank tetapi milik pemegang-pemegang rekening sungguhpun banyak orang mengira uang pinjaman dari bank itu adalah kepunyaan bank yang bersangkutan.

Sepanjang pengetahuan penulis dewasa ini belum ada bank-bank yang dapat membanggakan diri memiliki modal sendiri yang cukup besarnya untuk dipinjam-pinjamkan kepada para nasabah mereka. Hanya sebagian yang kecil saja dari jumlah yang biasa dipinjamkan oleh bank adalah milik bank sendiri. Dengan demikian maka para peminjam harus sadar bahwa karena uang yang mereka pinjam itu adalah milik masyarakat, mereka harus bertanggung jawab penuh dalam mengembalikan pinjaman itu pada waktu-waktu yang sudah disepakati.

Pimpinan sebuah bank mempunyai kepercayaan para pegawainya yang bertugas menyelenggarakan peminjaman uang akan melakukan tugas mereka itu berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat. Pegawai-pegawai bank itu pun harus mempunyai keyakinan bahwa para peminjam tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Dengan kata lain landasan bersama yang berlaku bagi industri perbankan ASEAN adalah *kepercayaan*.

Dalam kenyataannya kepercayaan ini sering digoyahkan tidak saja karena para bankir sendiri tetapi juga para pemegang rekening, peminjam dan pemegang saham melakukan penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma yang sudah ditentukan. Demikian pula ada pihak-pihak di luar kalangan organisasi perbankan yang sering menyalahgunakan jasa-jasa in-

ANALISA

dustri perbankan. Namun demikian tidaklah berarti kepercayaan sudah hilang sama sekali. Penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma yang sudah ditentukan selalu terjadi dan ini bukan suatu gejala yang hanya terjadi di negara-negara berkembang. Di negara-negara di mana industri perbankan sudah jauh lebih maju segi-segi penyimpangan semacam itu pun masih selalu ada sebagaimana terbukti dari kejatuhan banyak bank besar di negara-negara Barat misalnya Herstat Bank di Jerman Barat dan lain-lain bank di Amerika Serikat, Swiss dan negara-negara lainnya.

Uang dan Kepercayaan

Sering dikatakan uang adalah barangnya seorang bankir tetapi sebagaimana telah dijelaskan di atas hal utama yang memungkinkan tersedianya uang pada bank adalah kepercayaan. Uang adalah bentuk konkrit kepercayaan itu. Dalam konteks ini uang harus ditafsirkan dalam arti yang luas. Ia dapat berarti alat-alat keuangan yang dipakai dalam industri perbankan seperti misalnya apa yang dinamakan bills of exchange dan certificates of deposit. Uang sebagai alat pembayaran mempunyai nama yang berbeda-beda di masing-masing negara ASEAN misalnya di Malaysia ia bernama Ringgit atau Dollar, di Pilipina Peso, di Muangthai Baht, di Singapura Singapore Dollar dan di Indonesia Rupiah.

Dasar kelima alat pembayaran yang berlainan nama dan nilai tukarnya itu adalah kepercayaan sehingga dasar pemakaian kelima mata uang tersebut di antara negara-negara ASEAN pun haruslah kepercayaan pula. Jika kepercayaan demikian itu ada kita dapat berbicara tentang teknik-teknik dan mekanisme yang membuat mata-mata uang itu dapat diterima di negara-negara ASEAN. Dikarenakan perkembangan-perkembangan di dunia dan dalam sistem moneter internasional maka mata-mata uang negara-negara ASEAN telah dapat dikaitkan pada Pound Sterling Inggris, Dollar Amerika Serikat dan mata-mata uang lainnya. Konvertibilitas uang di antara negara-negara ASEAN

belum nampak berlaku secara luas tetapi sebagai suatu kenyataan sejarah patut dicatat bahwa konvertibilitas itu sudah ada antara Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia. Rupiah Indonesia pun secara tidak resmi dapat ditukar dengan mata uang lainnya yaitu di pasaran bebas di Singapura. Persoalan konvertibilitas mata-mata uang negara-negara ASEAN di antara negara ASEAN sendiri telah dibicarakan pada beberapa pertemuan tetapi hingga sekarang belum ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menanggulangnya karena bank-bank menganggap soal ini termasuk wewenang pemerintah negara-negara ASEAN masing-masing. Menurut hemat kami sikap demikian itu memang benar tetapi seandainya bank-bank di negara-negara ASEAN sendiri bersedia menerima mata-mata uang sesama negara ASEAN atas dasar konvertibilitas dengan mata uang mereka sendiri maka mungkin masalahnya akan mulai terpecahkan dengan sendirinya. Misalnya jika seseorang membawa mata uang Rupiah atau traveller's check dalam Rupiah ke negara-negara ASEAN lainnya hendaknya bank-bank di sana bersedia menerimanya untuk dipertukarkan dengan mata uang setempat. Jika bank-bank yang berada di bawah naungan Dewan Perbankan ASEAN mulai menginstruksikan hal ini kepada aparaturnya masing-masing maka cepat atau lambat kebiasaan ini akan semakin meluas sehingga dalam suatu kurun waktu tertentu misalnya 10 tahun (atau lebih cepat lagi) kebiasaan itu sudah akan melembaga.

Mungkin masalah konvertibilitas ini tidaklah sesederhana seperti yang kami kemukakan di atas karena persoalan-persoalan lain seperti teknik-teknik perbankan, mekanisme clearing dan peraturan-peraturan yang mungkin diadakan oleh pemerintah belum ikut diperhitungkan. Namun ada kemungkinan bank-bank sentral yang bersangkutan dan bank-bank lainnya di negara-negara ASEAN sudah melakukan suatu penelitian atas kemungkinan-kemungkinan, kesulitan-kesulitan dan halangan-halangan yang tersangkut dalam masalah ini. Jika demikian baiklah kita meninjau masalahnya secara lebih mendalam.

INDUSTRI PERBANKAN

Jika kita menelaah perkembangan dan keadaan industri perbankan di negara-negara ASEAN maka akan kita lihat taraf-

taraf perkembangan yang berbeda-beda dan mungkin juga perbedaan-perbedaan dalam struktur dan pola dan sebagainya.

Tugas-tugas Industri Perbankan

Yang dimaksudkan di sini bukanlah tugas-tugas industri perbankan dalam arti sempitnya. Dalam teorinya salah satu tugas bankir ialah menimbulkan minat pada masyarakat untuk menyimpan uang di bank, uang mana kemudian akan dipakai untuk atau disalurkan ke sektor produksi sehingga dengan demikian bank sebenarnya bertindak sebagai perantara antara sektor tabungan dan sektor produksi.

Perkembangan industri perbankan mencerminkan keanekaragaman kebutuhan dunia usaha dan industri akan berbagai macam dan bentuk alat keuangan. Jika sesuatu negara sedang berada dalam proses industriálisasi atau mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti misalnya sektor jasa (pariwisata dan sebagainya) perlu diusahakan agar sektor perbankan tidak menjadi terbelakang karena pengembangan yang tidak sejalan akan menyebabkan terjadinya suatu kekosongan yang akan mudah diisi oleh lembaga-lembaga keuangan nonbank.

Industri perbankan mempunyai arti yang vital dalam pengembangan perekonomian, dunia usaha dan industri. Suatu industri perbankan yang sudah berkembang akan lebih mempercepat pengembangan sub-sub-sektor perekonomian dan pada gilirannya sub-sub-sektor tersebut akan saling memperkuat dan saling menunjang. Kami mengetahui misalnya bahwa tonase perkapalan di negara-negara ASEAN tidak sama. Di Indonesia tonase perkapalan berjumlah kurang lebih 1.5 juta DWT (ton bobot mati). Pilipina memiliki tonase yang kurang lebih sama. Di Muangthai jumlahnya adalah 450.000 DWT dan di Malaysia kurang lebih 650.000 DWT. Tetapi di Singapura jumlah tonasenya jauh lebih besar yaitu kurang lebih 11 juta DWT. Karenanya maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa salah satu sebab perkembangan yang sedemikian jauhnya sub-sektor

pengangkutan di Singapura adalah taraf perkembangan yang tinggi dari industri perbankannya yang mampu menyediakan segala macam alat pembiayaan termasuk alat pembiayaan perkapalan. Sektor ini agaknya masih belum begitu berkembang di negara-negara ASEAN lainnya.

Tersedianya atau kemudahan memperoleh alat-alat pembiayaan perkapalan mempengaruhi struktur biaya tarif-tarif perkapalan. Tarif-tarif perkapalan Singapura terkenal sangat bersaing tidak saja di lingkungan ASEAN tetapi juga di dunia internasional.

Yang diterangkan di atas hanyalah suatu contoh betapa vitalnya peranan yang dapat dimainkan suatu industri perbankan yang melayani sub-sub-sektor perekonomian dengan tujuan memperkuat perekonomian nasional.

Perkembangan Industri Perbankan ASEAN

Industri perbankan ASEAN menunjukkan taraf-taraf perkembangan yang berbeda-beda hal mana bersangkutan misalnya dengan perkembangan historis, pengalaman-pengalaman, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pihak yang berwajib di bidang keuangan dan perundang-undangan di masing-masing negara ASEAN.

Peranan Pemerintah

Peranan yang dimainkan pemerintah dan sampai di mana pemerintah terlibat di dalam industri perbankan ASEAN merupakan faktor-faktor penting dalam usaha menilai perkembangan industri perbankan ASEAN. Mungkin sekali hal ini berlaku pula di semua negara berkembang. Di Indonesia peranan dan keterlibatan pemerintah nampak dalam bentuk yang konkrit. Bank-bank milik negara memainkan peranan yang dominan di dalam industri perbankan. Bersama-sama dengan

Bank Sentral (Bank Indonesia) bank-bank pemerintah menempati suatu kedudukan yang dominan ditinjau dari segi jumlah kredit keseluruhan. Di Malaysia di mana pada suatu waktu di masa lalu bank-bank dagang besar pernah dikuasai oleh sektor swasta, pemerintah, melalui lembaga-lembaga milik negara, telah mulai ikut memodali bank-bank swasta nasional sehingga partisipasi pemerintah tersebut kini, kalau tidak salah, sudah mencapai sekurang-kurangnya 30% hal mana menunjukkan peranan pemerintah di dalam bank-bank dagang swasta sedang meningkat. Di Pilipina hanya dua di antara ke-27 bank yang ada dimiliki pemerintah. Dari segi keseluruhan aktiva, bank-bank swasta nasional Pilipina memiliki aktiva sebesar P. 33,6 juta sedangkan bank-bank milik negara hanya memiliki P. 19,7 juta sehingga kita dapat menyimpulkan peranan bank-bank swasta di Pilipina secara relatif lebih menonjol daripada di negara-negara ASEAN lainnya. Di Muangthai bank dagang yang terbesar — Bangkok Bank — adalah suatu bank swasta hal mana menunjukkan di negara ini pengembangan industri perbankan banyak ditentukan oleh prakarsa sektor swasta. Nampaknya suatu "pertarungan" antara pihak yang berwajib di bidang moneter dan bank-bank swasta nasional sedang terjadi dalam hal "pelebaran pemilikan".

Singapura mempunyai bank-bank swasta nasional besar yang terbanyak di antara negara-negara ASEAN yaitu OCBC, UOB dan lain-lainnya. Tetapi perlu juga dicatat kiranya bahwa perkembangan yang pesat Development Bank of Singapore (DBS) milik negara juga merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diabaikan karena bank ini juga memainkan peranan yang aktif di dalam sektor-sektor usaha, industri dan lain-lainnya di Singapura. Bank ini mungkin akan menjadi pemegang saham tersebar di dalam perusahaan-perusahaan dagang dan industri Singapura sehingga ia pun akan memegang peranan yang dominan di dalam industri perbankan dan ikut serta di dalam pasaran-pasaran uang regional dan internasional.

Peranan masing-masing pemerintah negara ASEAN di dalam industri perbankan dan peranan masing-masing sektor

swasta akan tercermin di dalam komposisi serta pandangan delegasi-delegasi yang nanti akan hadir pada pertemuan Dewan Perbankan ASEAN di Bali. Kita semuanya mungkin sudah mengetahui aspek ini tetapi mungkin pula kita kurang menyadarinya. Betapa pun hal ini tergantung dari pokok-pokok pembicaraan yang sudah dan masih akan diusulkan untuk dibicarakan pada sidang-sidang pertemuan.

Pemilikan Bank-bank

Ditilik dari segi pemilikan maka bank-bank di kawasan ASEAN dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu bank-bank :

- a. milik pemerintah 100%,
- b. milik pemerintah dan swasta bersama,
- c. milik swasta 100%.

Misalnya di Singapura dan Malaysia dan mungkin pula di Pilipina bank-bank milik pemerintah terdaftar pada Bursa Saham sehingga saham-saham mereka ikut diperjualbelikan di bursa sebagaimana halnya dengan saham-saham Development Bank of Singapore. Selain pemerintah Singapura (melalui lembaga-lembaga keuangan tertentu yang dikuasainya) pihak asing pun (kalau tidak salah Bank of America) ikut menjadi pemegang saham DBS. Di Indonesia pemilikan bank-bank negara berada dalam tangan pemerintah (dalam hal ini Departemen Keuangan).

Di sektor swasta pemilikan bank menurut macam pemilikan dapat dibagi lagi sebagai berikut :

- a. milik swasta nasional 100%, yang dapat dibagi lebih khusus lagi sebagai berikut :
 - (i) bank-bank yang terdaftar di Bursa Saham, dan
 - (ii) bank-bank yang tidak terdaftar pada Bursa Saham (umumnya masih berada di tangan keluarga-keluarga atau kelompok-kelompok perorangan) dan
- b. dimiliki secara patungan dengan bank asing dengan pemilikan sebagian terbesar saham-saham oleh pihak nasional.

Bank-bank yang tergolong a. (i) dan b. di atas terdaftar pada Bursa-bursa Saham di Singapura, Pilipina, Malaysia dan Muangthai tetapi di Indonesia saat ini belum ada bank swasta nasional yang terdaftar pada Bursa Saham. Kebanyakan bank nasional swasta di Indonesia berada dalam tangan keluarga-keluarga atau kelompok-kelompok perorangan. Di negara ini pola pemilikan agak berlainan daripada di negara-negara ASEAN lainnya karena sebagaimana yang diterangkan terlebih dahulu, andaikata pun ada bank-bank swasta nasional yang terdaftar pada Bursa Saham dalam banyak hal dan dengan berbagai cara bank-bank tersebut dalam kenyataannya masih sering dikuasai oleh kelompok-kelompok perorangan atau keluarga-keluarga sehingga dengan demikian bank-bank ini belum dapat dianggap sebagai "perusahaan-perusahaan milik umum sepenuhnya".

Suatu perbedaan lagi dalam pola pemilikan di antara bank-bank di kawasan ASEAN adalah adanya negara-negara ASEAN tertentu yang mengizinkan bank-bank asing menjadi pemegang saham dalam bank-bank di negara-negara tersebut sebagaimana halnya di Singapura, Malaysia, Pilipina dan Muangthai.

Di Indonesia hanya ada satu bank — Bank Perdania — yang diperbolehkan mempunyai partner asing d.h.i. Sanwa Bank dan yang diberi ijin usaha semenjak 1958. Dalam hal lembaga-lembaga keuangan nonbank seperti bank-bank pedagang keikutsertaan pihak asing diperbolehkan di semua negara ASEAN. Pola pemilikan yang dijelaskan di atas sudah pasti akan mempengaruhi dan membawa akibat-akibat tertentu terhadap usaha pengembangan industri perbankan ASEAN.

Misalnya ada kalangan-kalangan tertentu yang berpendapat bahwa keikutsertaan bank asing di dalam bank-bank nasional dengan pemegangan jumlah saham yang kecil akan membawa pengaruh berkembangnya perbankan nasional secara lebih pesat hal mana tidak mungkin terjadi dalam situasi di mana partisipasi asing demikian tidak diperkenankan. Pengalaman Pilipina sangat menarik karena di sana beberapa bank asing yang tadinya ikut serta dalam pemilikan modal bank-bank nasional kini telah menghentikan partisipasinya. Persoalan yang menarik dalam

hubungan ini memang adalah : mengapa bank-bank asing itu sampai berbuat begitu? Di Malaysia nampaknya usaha-usaha patungan antara bank-bank asing dan bank-bank nasional berjalan dengan baik dan hingga sekarang belum pernah terdengar berita tentang penarikan diri bank-bank asing dari usaha-usaha patungan tersebut.

Di Indonesia Bank Perdania agaknya juga berjalan dengan baik. Partner asing di dalam bank ini yaitu Sanwa Bank menjalankan persetujuan-persetujuan manajemen dengan sejumlah bank nasional lainnya.

Kiranya kita akan mendengar hal-hal yang menarik jika bank-bank di berbagai negara ASEAN dengan pola-pola pemilikan yang berbeda-beda itu dapat menceritakan pengalaman mereka apalagi jika mereka dapat mengisahkan pengalaman mereka masing-masing dalam menjalankan pola pemilikan mereka sendiri.

Dari Segi Ukuran

Ditilik dari segi ukuran bank-bank ASEAN saling berbeda baik di negaranya masing-masing maupun di kawasan ini sebagai keseluruhan. Dibandingkan dengan bank-bank yang masih berukuran menengah dan kecil bank-bank seperti Bank Bumi Daya, Bangkok Bank, OCBC, DBS dan United Overseas Bank merupakan bank-bank yang cukup besar. Ukuran sesuatu bank akan mempengaruhi kemampuannya memberikan jasa-jasanya kepada dunia usaha. Bank-bank besar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang selengkapnyanya. Bank-bank menengah dan kecil tidak dapat berbuat demikian dan akibatnya adalah bahwa harga uang di bank-bank menengah dan kecil menjadi lebih tinggi daripada di bank-bank besar.

Selain itu bank-bank besar telah mulai berorientasi kepada dunia usaha regional dan internasional. Ini berarti bank-bank besarlah yang akan memperoleh manfaat yang lebih besar dari

ANALISA

adanya Dewan Perbankan ASEAN karena sudah mampu menjalankan usaha yang bersifat regional dan internasional. Karena itu pula maka bank-bank besarlah saja yang mampu meluaskan jaringan-jaringannya secara regional dan internasional. Bank-bank besar regional telah mulai berusaha di bidang pembiayaan lepas pantai. Bank-bank yang dimaksud di sini adalah terutama bank-bank di Singapura dan Pilipina dan Bangkok Bank di Muangthai.

Jika Dewan Perbankan ASEAN memusatkan perhatiannya pada kerja sama di antara bank-bank besar maka hasilnya akan lebih cepat menjadi nyata karena bank-bank tersebut pada dasarnya sudah menjalankan usaha yang cukup banyak. Bahkan tanpa Dewan Perbankan ASEAN sekalipun di antara bank-bank besar ASEAN sudah ada usaha-usaha kerja sama yang berjalan.

Kecemasan bank-bank menengah dan kecil tentu saja akan menarik perhatian bank-bank besar ASEAN. Adanya kecemasan ini sudah pernah dikemukakan tetapi dalam kenyataannya bank-bank menengah dan kecil ini lebih banyak berorientasi pada penyediaan biaya lokal. Dengan demikian agaknya titik berat usaha-usaha kerja sama di antara bank-bank menengah dan kecil ini seharusnya lebih banyak diletakkan pada usaha-usaha pendidikan dan latihan daripada usaha-usaha perbankan regional. Pada dasarnya bank-bank menengah dan kecil akan menghadapi rintangan-rintangan yang besar jika mereka hendak memulai bergerak di bidang pinjam-meminjam antar bank atau penjualan surat-surat promesse yang telah mereka tandatangani. Peraturan-peraturan pemerintah mungkin akan merupakan salah satu rintangan yang utama.

Dengan demikian nampak ukuran (besar kecilnya) sesuatu bank merupakan suatu aspek yang menarik dan jika ditinjau secara terus terang kerja sama pada taraf Dewan Perbankan ASEAN akan lebih banyak memberi manfaat bagi bank-bank besar (yang pada dasarnya mampu memberikan jasa-jasa perbankan yang selengkapnyanya) daripada bagi bank-bank menengah dan kecil. Hal ini lebih-lebih lagi berlaku bagi bank-bank menengah dan kecil di Indonesia yang digolongkan sebagai bank nondevisa. Kegiatan-kegiatan bank semacam ini lebih terbatas

daripada bank-bank menengah yang tergolong bank devisa. Bank-bank nondevisa sulit sekali memperoleh dana dalam negeri ataupun luar negeri yang relatif murah.

Ukuran juga memainkan peranan yang menentukan dalam menarik tenaga-tenaga yang berkaliber tinggi. Dibandingkan dengan bank-bank besar, bank-bank menengah dan kecil hanya dapat menawarkan kemungkinan-kemungkinan yang terbatas sekali kepada tenaga-tenaga demikian. Luasnya usaha dan nama yang sudah dikenal akan lebih mampu menarik manajer-manajer yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang tinggi. Hal ini merupakan suatu kenyataan kehidupan baik di dunia internasional maupun di lingkungan ASEAN.

Karena ukurannya yang besar berarti sesuatu bank mampu memberikan jasa-jasa selengkapnyanya, bank demikian itu akan dapat menarik lebih banyak kalangan atau orang untuk berurusan dengannya. Kemungkinan besar di antara bank-bank ASEAN yang besar akan timbul suatu bentuk kerja sama untuk menciptakan, melanjutkan dan membagi-bagikan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana yang umumnya terjadi dalam hal pinjaman-pinjaman yang disindikatkan (*syndicated loans*).

Dari Segi Tingkat Perkembangan Ekonomi

Industri perbankan pertama-tama harus dapat memberikan jasa-jasanya kepada perekonomian nasional. Hal ini bersangkutan erat dengan tingkat pembangunan.

Kebanyakan perekonomian negara ASEAN masih berada pada taraf peralihan dari industri primer ke industri sekunder (*industrialisasi*) sehingga di negara-negara tersebut titik berat kegiatan ekonomi adalah menghasilkan berbagai macam barang. Patut dicatat di sini bahwa perekonomian Singapura sekarang sedang berkembang menuju terwujudnya suatu industri tersier di mana titik berat tujuan pengembangan ialah menciptakan suatu perekonomian jasa dan suatu masyarakat pengetahuan. Di

ANALISA

tahun-tahun mendatang Singapura akan berkembang menjadi suatu pusat cendekia, keuangan dan teknologi. Jika faktor-faktor produksi diarahkan kepada usaha menghasilkan jasa-jasa dan bukan barang-barang, hubungan antara pimpinan perusahaan dan karyawan di dalam suatu perekonomian jasa dan masyarakat pengetahuan akan lain sifatnya. Cara pemberian jasa kepada suatu masyarakat yang sedang berada dalam proses peralihan menjadi suatu perekonomian jasa dan masyarakat pengetahuan akan berlainan sekali daripada cara pemberian jasa kepada suatu masyarakat industri.

Tingkat perkembangan perekonomian yang dilayani industri perbankan dalam sesuatu negara akan menimbulkan suatu perbedaan di dalam tingkat kemajuan industri perbankan negara tersebut sebagaimana ternyata dalam hal perkembangan industri perbankan di Singapura dan Pilipina.

Arah perkembangan Singapura menjadikan dirinya sebuah pusat keuangan akan mendorong bank-bank Singapura menjalin hubungan-hubungan yang erat dengan industri perbankan di negara-negara ASEAN lainnya. Karena pembukaan kantor-kantor cabang belum mungkin maka mereka akan harus mengadakan perjanjian-perjanjian kerja yang akan memungkinkan mereka mempunyai perwakilan di negara-negara ASEAN lainnya mengingat pola dan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter pemerintah yang berlaku di masing-masing negara tersebut.

IKHTISAR

Dalam tulisan yang pendek ini telah kita coba meninjau beberapa aspek industri perbankan ASEAN dari segi penglihatan kualitatif karena peninjauan dari segi-segi kuantitatif sudah banyak dilakukan oleh penganalisa-penganalisa lain.

Salah satu aspek yang nampak sebagai denominator bersama adalah aspek kepercayaan yang merupakan barang pokok industri perbankan dan aspek ini sudah berbentuk uang dan alat-alat keuangan.

Jika aspek kepercayaan ini diterima sebagai landasan berusaha bank-bank maka berbagai alat pembayaran yang didasarkan atas kepercayaan akan lebih mudah dinilai sebagaimana halnya dengan mata-mata uang ASEAN seperti Rupiah, Peso, Ringgit, Baht dan Dollar Singapura. Jika dasar ini diterima maka akan jauh lebih mudahlah bagi kita menemukan suatu mekanisme dengan mana kita dapat membuat kelima mata uang itu saling dapat dipertukarkan (konvertibel).

Kemudian kita telah meninjau pula beberapa ketidaksamaan yang timbul dari tugas-tugas industri perbankan di masing-masing negara ASEAN termasuk ketidaksamaan dalam tingkat perkembangan. Dalam hubungan ini telah kita lihat peranan pemerintah yang berbeda-beda dalam corak dan partisipasinya di dalam industri perbankan ASEAN.

Aspek-aspek lain yang menyangkut kesamaan atau ketidaksamaan ialah pola-pola pemilikan atas industri perbankan ASEAN. Hal ini akan secara langsung ataupun tak langsung mempengaruhi ukuran industri perbankan ASEAN. Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah hubungan yang erat yang ada antara tingkat perkembangan perekonomian dan tingkat perkembangan industri perbankan. Suatu perekonomian yang sudah berada di dalam proses peralihan menjadi suatu perekonomian jasa dan suatu masyarakat pengetahuan tak bisa tidak harus mempunyai suatu industri perbankan yang maju karena yang demikian ini merupakan landasan perekonomian jasa dan masyarakat pengetahuan. Singapura berada dalam proses menjadi suatu pusat cendekia, keuangan dan teknologi dan sudah mengembangkan industri perbankannya hingga suatu taraf yang tinggi.

Beberapa di antara aspek-aspek yang disebutkan di atas sudah barang tentu tidaklah mencakup segala-galanya. Yang hendak kita lakukan dalam tinjauan ini hanyalah mengaji aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam usaha-usaha kita mengadakan perjanjian-perjanjian kerja di kalangan industri perbankan ASEAN.